

ISSN : 1412 - 0852

# Jurnal Akuntansi & Bisnis

(Journal of Accounting & Business)

Vol. 5, No. 1, Pebruari 2005

**Novita Indrawati**

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada Penawaran Umum Perdana

**Renata Zoraifi**

Pengaruh Locus of Control, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pertimbangan Etis terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit

**Bandi  
Rahmawati**

Relevansi Kandungan Informasi Komponen Arus Kas dan Laba dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan

**Santoso Tri Hananto**

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

**Suwaldiman**

The Future of Management Accounting: Regaining the Relevance Through Value-Creation and Human-Relations Perspective

**Slamet Haryono**

Struktur Kepemilikan dalam Bingkai Teori Keagenan

**Ehrmann Suhartono**

Model-Model Public Private Partnership pada Sektor Pelayanan Air Bersih

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

## MODEL-MODEL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PADA SEKTOR PELAYANAN AIR BERSIH

EHRMANN SUHARTONO

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta

### ABSTRACT

*This article tries to provide a sight on public private partnership and its forms in water sector. The article begins with the definition of public private partnership and then go on through its forms, namely; service contract, build-operated transfer contract, concession, joint ventures and community based provision with their examples in several countries.*

**Keywords** : *public private partnership, service contract, build-operated transfer contract, concession, joint ventures, and community based provision.*

### PENDAHULUAN

Lebih dari tiga dekade terakhir, jumlah penduduk di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jumlah penduduk yang tinggal di kota mengalami perkembangan menjadi tiga kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk di kota yang pesat ini akan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk yang miskin (Plummer dan Slater, 2001).

Kepadatan penduduk yang sangat padat di daerah perkotaan menjadi perhatian bagi pemerintah, baik pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Perhatian pemerintah tersebut adalah bagaimana memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Banyak fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah, tidak dapat melayani seluruh penduduk. Pemerintah menyadari bahwa keuangan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Permasalahan yang lain adalah meskipun pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat, banyak penduduk yang tetap tidak bisa terlayani. Contohnya adalah pelayanan air bersih, pelayanan sanitasi, dan pelayanan energi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat sendirian untuk menangani permasalahan tersebut. Pemerintah menyadari bahwa pajak yang diambil dari masyarakat tidak cukup untuk membiayai pelayanan air bersih, pelayanan sanitasi, dan pelayanan energi. Hal ini memberikan implikasi bahwa pemerintah harus menjalin kerjasama dengan pihak lain yang kompeten untuk menanganinya. *Public Private Partnership* merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat. (Plummer dan Nhemachena, 2001).

### **PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPs)**

*Public Private Partnership* adalah hubungan kerjasama antara pelaku sektor publik dan sektor swasta dalam hal pelayanan kepada masyarakat. (Thomas dan Curtis, 2001). Pelaku sektor swasta meliputi pelaku bisnis seperti *non-governmental organizations* (NGOs) dan *community-based organizations* (CBOs). CBOs bisa berupa satu atau lebih komunitas atau masyarakat sedangkan NGOs merupakan perantara antara pemerintah dan masyarakat. NGOs akan memberikan pelayanan kepada komunitas berupa bantuan teknik dan keuangan untuk pengembangan proyek komunitas (Bennet et al, 1999). Kelebihan dari PPPs untuk masyarakat adalah adanya inovasi, akses ke sumber keuangan, pengetahuan dan teknologi, manajerial yang efisien. Kelebihan PPPs yang didasari dengan tanggung jawab terhadap sosial, kepekaan lingkungan, dan pengetahuan tentang sektor publik di daerahnya, akan bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di perkotaan. (Plummer, 2000)

Di seluruh dunia, perusahaan swasta sudah terbukti kemampuannya untuk memberikan nilai tambah pada operasi bisnis. Pada sektor air, PPPs secara nyata memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan. Wahl (1993) mengatakan kerjasama dengan pihak swasta merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan masalah di sektor air. Rooss (2002) mengatakan PPPs memberikan dampak yang lebih baik untuk pelayanan air bersih di Coatesville. Selain itu, Thelen (2002) juga mengatakan PPPs akan memberikan pelayanan yang lebih baik dengan penggantian sistem air bersih dengan melibatkan pihak swasta di Sugar Land Texas. Segal (2003) mengatakan PPPs akan memberikan harga pelayanan yang lebih murah di kota Atlanta.

Penekanan terhadap PPPs adalah PPPs akan menggantikan peran pemerintah dalam pelayanan pada masyarakat, tetapi bukan berarti tanggung jawab sektor publik menjadi hilang. Sektor swasta yang *profit oriented*, jika tidak diatur dengan regulasi dari sektor publik, akan memberikan pelayanan yang tidak semestinya pada masyarakat atau memberikan harga yang tidak wajar. Hal ini disebabkan sektor swasta akan mencari keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap memegang tanggung jawab untuk menjamin pelayanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah ini bisa berujud penyedia, *partners*, atau *regulator* pelayanan masyarakat. Hal ini tergantung dari kemampuan dan keterbatasan pemerintah.

Permasalahan yang sering timbul dalam PPPs adalah budaya masing-masing organisasi, baik pemerintah maupun sektor swasta. Setiap organisasi akan cenderung bertindak, bekerjasama dengan organisasi lain, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sektor publik akan bertindak sebagai sektor publik dan sektor swasta akan bertindak seperti sektor swasta, sehingga meskipun pemerintah dan sektor swasta telah lama bekerjasama, ketika pemerintah membeli produk dari swasta akan menimbulkan hubungan yang kompleks. Pemerintah berpikir bahwa sektor swasta akan mengambil keuntungan dari pemerintah sedangkan sektor swasta berpikir bahwa pemerintah terlalu banyak pertimbangan dan banyak menghabiskan waktu.

Pemecahan permasalahan tersebut adalah kedua sektor harus menyadari posisinya masing-masing dan memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat. Keduanya harus menyadari bahwa keduanya akan saling mempengaruhi, tetapi keduanya harus mengarahkan PPPs untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## OPERATION, MAINTENANCE, DAN SERVICE CONTRACT

Pada *operation, maintenance* dan *service contract*, sektor publik menyewa sebuah organisasi swasta untuk mengerjakan satu atau lebih tugas atau pelayanan publik selama lima sampai tujuh tahun. Sektor publik masih sebagai penyedia pelayanan yang utama sedangkan organisasi swasta mengerjakan pelayanan yang diserahkan kepada pihak luar oleh sektor publik. Sektor swasta harus menentukan pelayanan publik yang sesuai dengan biaya dan pelayanan tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sektor publik. Secara umum, pemerintah menggunakan prosedur kompetitif untuk memilih pihak yang menyelenggarakan *service contract*. Pembelian tersebut harus didasarkan pada waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan yang membutuhkan sumber daya yang sedikit (Bennet et al, 1999).

### Struktur Keuangan Service Contract

Pada *service contract*, pemerintah membayar kepada sektor swasta sejumlah *fee* yang ditentukan sebelumnya untuk *service* tersebut. Pembayaran tersebut berdasarkan biaya berdasarkan waktu pelayanan, *unit cost*, atau berdasarkan hal lain. Pilihan yang lain adalah menggunakan *cost plus fee formula*, di mana biaya-biaya merupakan biaya tetap. Selanjutnya sektor swasta akan mengambil *fee* berdasarkan presentase dari *cost* tersebut. Kontraktor swasta tidak selalu memiliki hubungan secara langsung dengan pengguna (*users of services*) dalam hal keuangan karena hubungan keuangan tersebut hanya dilakukan dengan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan dari investasi modal yang dibutuhkan untuk memperluas sistem pelayanan.

*Service contract* memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut ini.

1. *Service contract* menyediakan pilihan risiko yang lebih rendah dalam konteks hubungannya dengan sektor swasta dan *service contract* akan membantu pemerintah untuk mengerti secara lengkap sistem infrastruktur sektor swasta.
2. *Service contract* memiliki keuntungan untuk menyediakan sistem operasi yang lebih baik sehubungan dengan usaha pemerintah untuk mendapatkan kinerja dan efisiensi yang lebih baik karena adanya transfer teknologi dan manajerial dari sektor swasta..
3. *Service contract* secara umum sangat kompetitif sebagai bentuk dari privatisasi. Kontraktor swasta mendapatkan tekanan untuk membuat biaya tetap rendah karena lingkup kontraknya kecil. Contohnya adalah pemasangan meteran air atau memperbaiki pipa air. Hal ini akan menambah kompetisi dan menyediakan kesempatan bagi pemerintah untuk memilih kontraktor yang memuaskan dari segi kualitas.

*Service contract* memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut ini.

1. *Service contract* tidak melibatkan masuknya modal swasta sehingga pemerintah tidak menciptakan suatu dasar untuk mengoptimalkan sistem infrastruktur yang sudah ada. Contohnya adalah efektifitas kontraktor swasta untuk memperbaiki pelayanan tergantung dari kemampuan dari pemerintah untuk menyediakan modal.

2. *Service contract* membuat pemerintah berperan dalam isu-isu yang bersifat politis. Contohnya adalah penentuan besarnya *fee* untuk pelayanan dan kepemilikan aset-aset.
3. Pemerintah sering di bawah tekanan untuk menyediakan *service contract* yang murah tetapi tidak melupakan untuk dapat memberikan pelayanan yang tinggi. Hal ini akan memberikan tekanan kepada pihak swasta untuk bisa memberikan solusi-solusi yang inovatif untuk menyediakan *service* tetapi dengan biaya yang serendahnya.

### BUILD-OPERATE-TRANSFER CONTRACT

*Build operate transfer contract* (BOT) didesain untuk membawa investasi sektor swasta membangun infrastruktur baru. Pada BOT, sektor swasta akan membangun, membiayai, dan mengoperasikan infrastruktur baru dan sistem baru yang sesuai standar pemerintah. Periode operasi adalah cukup lama agar sektor swasta dapat menerima kembali biaya-biaya konstruksi dan mendapatkan keuntungan. Jangka waktu operasi tersebut adalah 10-20 tahun. Setelah periode operasi selesai, seluruh infrastruktur diserahkan kepada pemerintah. (Bastian, 2001) Pemerintah berkedudukan sebagai pemilik fasilitas infrastruktur, sekaligus menjadi konsumen dan *regulator* dari pelayanan tersebut. (Bennet et al, 1999)

#### Struktur Keuangan Build Operate Transfer Contract

Pada BOT, sektor swasta menyediakan modal untuk membangun fasilitas-fasilitas baru. Sebaliknya, sektor publik setuju untuk membeli output dengan harga minimum untuk menjamin sektor swasta untuk mendapatkan kembali investasinya sepanjang masa operasi. Hal ini membutuhkan estimasi yang akurat pada awal periode. Jika terjadi *over-estimate* atau *under-estimate* akan menimbulkan masalah. Penentuan besar dan rentang waktu mengenai BOT membutuhkan pengetahuan yang canggih dan seringkali menjadi kompleks.

BOT memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut ini.

1. BOT adalah suatu cara yang efektif untuk membawa modal dari sektor swasta untuk pembangunan fasilitas infrastruktur baru atau memperbaiki yang telah ada sebelumnya.
2. Perjanjian BOT cenderung untuk mengurangi risiko pasar dari sektor swasta. Hal ini disebabkan adanya pemerintah sebagai satu-satunya konsumen. Hal ini mengurangi risiko kelangkaan permintaan dan kemampuan membayar konsumen. Kontraktor sektor swasta akan menolak perjanjian BOT jika pemerintah tidak menjamin investasinya tidak kembali.
3. BOT telah banyak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas baru di banyak negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya sektor swasta yang akan berinvestasi pada infrastruktur tersebut.

BOT memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut ini.

1. BOT secara umum hanya meliputi satu fasilitas, yang mana terdapat keterbatasan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya atau efisiensi.

2. BOT menyediakan beberapa insentif untuk efisiensi dan sektor swasta harus berkompetisi untuk memenangkan kontrak tersebut. BOT akan membuat kontrak ini sulit untuk didesain karena permintaan efisiensi dan kompetisi yang ketat.

## CONCESSIONS

Pada *concessions*, pemerintah memilih kontraktor swasta untuk bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan infrastruktur di area tertentu. Hal ini meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan manajemen. Kontraktor swasta bertanggung jawab penuh untuk modal investasi yang diperlukan, untuk membangun dan meningkatkan sistem. Pembiayaan investasi *concessions* ini dimobilkan dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna. Sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan standar kinerja dan menjamin kontraktor swasta untuk mematuhi. Sektor swasta dibebani untuk membayar *fee* tertentu kepada pihak berwenang atau pemerintah.

Pada dasarnya, sektor publik mengalami pergeseran peranan. Peranan tersebut adalah dari penyedia pelayanan berpindah ke *regulator* untuk penentuan harga dan kuantitas. Regulasi tersebut menjadi sangat penting pada sektor penyediaan air bersih. Hal ini disebabkan air adalah barang publik dan sistem pelayanannya adalah monopoli. Aset infrastruktur tetap dipercayakan kepada kontraktor swasta sepanjang masa kontrak, tetapi aset tersebut milik pemerintah. *Concessions* berjangka waktu lebih dari 25 tahun. Jangka waktu ini tergantung dari kontraktor swasta membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan kembali investasinya.

### Struktur Keuangan Concessions

Sektor swasta bertanggung jawab penuh untuk seluruh modal dan biaya operasi. Biaya tersebut meliputi infrastruktur, bahan baku, dan perbaikan selama masa kontrak. Sebagai imbalan, sektor swasta mengumpulkan langsung tarif dari pengguna. Tarif ditentukan pada *concessions contract* yang mana termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terjadinya perubahan waktu kontrak.

*Concessions* memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut ini.

1. *Concessions* adalah cara yang efektif untuk membawa modal dari sektor swasta untuk dimasukkan ke dalam fasilitas infrastruktur baru atau renovasi yang telah ada.
2. Gabungan dari tanggung jawab investasi dan operasi memberikan insentif yang kuat kepada kontraktor untuk membuat pengambilan keputusan investasi menjadi efisien dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif.
3. *Concessions* memiliki sedikit campur tangan politik dari pemerintah. Hal ini berlawanan dengan penyelenggaraan pemerintah yang mana banyak mendapatkan tekanan politik.

Kelemahan dari *concessions* dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. *Concessions* yang sangat besar dalam skala besar, secara politik dapat menjadi isu yang kontroversial dan sulit untuk diorganisasikan dan dikendalikan.
2. Meskipun kontrak *concessions* menentukan secara khusus target, mekanisme penyesuaian harga dan standar pelayanan, pemerintah tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan.

3. Penyusunan *contractual framework* untuk *concessions* adalah untuk 25 tahun atau lebih. Prediksi untuk jangka waktu 25 tahun atau lebih, keakuratannya masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang dapat memprediksi dengan tepat selama jangka waktu yang lama.

## JOINT VENTURES

*Joint ventures* adalah alternatif untuk privatisasi secara penuh yang mana sektor publik dan sektor swasta berbagi tanggung jawab dan kepemilikan untuk memberikan pelayanan. Pada *joint ventures*, sektor publik dan swasta membentuk perusahaan baru atau berbagi kepemilikan atas perusahaan yang ada untuk memberikan pelayanan. Dalam kasus ini, *joint ventures* bersifat independen dari pemerintah. *Joint ventures* secara umum digunakan bersamaan dengan tipe *public partnership* yang lain. (Bennet, 2000)

*Joint ventures* menyediakan kerja sama yang sepenuhnya. Maksudnya adalah pemerintah, swasta, *non-governmental organization* dan yang lain dapat mengumpulkan sumber-sumbernya dan membagi apa yang diterima. Pada *joint ventures*, pemerintah dapat berperan sebagai *regulator*, tetapi juga sebagai pemegang saham yang aktif dalam perusahaan tersebut. Pada posisi ini, *joint ventures* mungkin membagi keuntungan perusahaan dan mendapatkan penerimaan politik yang lebih luas atas usahanya. Sektor swasta sering memiliki tanggung jawab untuk membentuk operasi manajemen sehari-hari. Pada *joint ventures*, sektor publik dan swasta harus bekerja sama pada tahapan seawal mungkin atau pada tahap *preinvestment* atau pada saat pengembangan proyek tersebut. (Caplan et al, 2001)

### Struktur Keuangan Joint Ventures

Pada *joint ventures*, sektor publik dan swasta harus membagi biaya studi kelayakan dari luar dan disiapkan untuk investasi baru pada perusahaan yang baru terbentuk. Modal *joint ventures* memerlukan pembagian risiko dan pembagian *reward*. Pemerintah harus menanggung risiko yang lebih kecil atau tidak sama sekali (Bastian, 2001).

Keunggulan dari *joint ventures* dapat disebut sebagai berikut ini.

1. *Joint ventures* menggabungkan keuntungan dari sektor swasta. Selain itu, terdapat kesempatan mengakses bidang keuangan, pengetahuan teknologi, efisiensi manajerial, dengan tanggung jawab sosial, kepekaan lingkungan, pengetahuan lokal mengenai sektor publik.
2. Pada *joint ventures*, sektor publik dan swasta berinvestasi pada perusahaan yang sama dan keduanya memiliki keinginan yang kuat.
3. Tanggung jawab penuh untuk investasi dan operasi yang diberikan pada sektor swasta dan publik merupakan insentif yang besar untuk pengambilan keputusan yang efisien dan mengembangkan solusi teknologi yang inovatif.
4. Partisipasi dari sektor publik dan sektor swasta memberikan inovasi dan fleksibilitas pada perencanaan proyek dan membantu menjamin bahwa sektor publik dan swasta dapat mengoptimalkan tujuan publik.

Kelemahan dari *joint ventures* adalah dapat disebutkan sebagai berikut ini.

1. Dalam beberapa kasus di pemerintahan kota, terdapat perbedaan tanggung jawab yang mana dapat memicu konflik kepentingan pada pemerintah kota. Hal ini dapat menambah risiko dan mengurangi keuntungan yang potensial yang muncul dari sektor swasta.
2. Sektor swasta cenderung untuk fokus pada pengguna sedang pemerintah cenderung pada proses.

### COMMUNITY-BASED PROVISION

*Community-based provision* berawal ketika keterbatasan keuangan menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup untuk masyarakat. *Community-based provision* mendorong anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Anggota dari *community-based provision* meliputi individual, keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup mikro. Seringkali beberapa aktivitas tidak dapat diakui dan tidak dapat terintegrasi dalam sistem yang formal. Di beberapa kota dimana pemerintah mengakui adanya NGO, NGO akan memberi bantuan pada grup non-formal ini secara terorganisir. NGO menyediakan input untuk proses manajemen media negosiasi antara CBO dengan lembaga politik yang lebih luas, jaringan kerja, dan penyebaran informasi. (Bennet et al, 1999)

Tabel 1. Ringkasan Model *Public Private Partnership*

	SERVICE	BOT	CONCESSION	JOINT VENTURE	COMMUNITY -BASED
Kepemilikan Aset	Publik	Publik	Publik	Gabungan	Masyarakat
Intensitas Peraturan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Sumber Pendanaan	Publik	Swasta	Swasta	Gabungan	NGO, swasta atau publik
Tenaga Kerja	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
Waktu Persiapan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah

#### Struktur Keuangan *Community-Based Provision*

*Community-based provision* melibatkan biaya yang rendah. Biaya organisasi dan material sering disediakan oleh NGO, yayasan-yayasan swasta, bantuan pengembangan, pemerintah, atau komunitas itu sendiri. Pengetahuan mengenai daerah lokal secara umum memberikan pengembangan terhadap solusi berbiaya paling rendah.

Keunggulan potensial dari *community-based provision* dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. *Community-based provision* menekankan pada pengetahuan lokal yang mana hasilnya lebih efisien bagi pelayanan dan mencegah investasi-investasi yang tidak sesuai.



2. *Community-based provision* mengurangi biaya investasi awal dengan mengintegrasikan sumber-sumber lokal seperti tenaga kerja, bahan baku, dengan baik untuk menjaga material-material, supervisi tenaga kerja, dan sebagainya.
3. *Community-based provision* dapat menyediakan penduduk lokal sebuah lapangan kerja dengan *income* yang stabil yang dapat menambah kondisi ekonomi lokal.
4. *Community group* adalah bersifat dinamis dan dapat merespon dengan baik kebutuhan pelanggan yang mana menghasilkan *service* yang lebih berkesinambungan.

Kelemahan dari *community-based provision* dapat disebutkan sebagai berikut ini.

1. Untuk membangun *community-based provision* yang berkesinambungan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada bentuk *public private partnership* yang lain.
2. Pemerintah kadang kala tidak mendukung *community-based provider* karena metode informal mereka dalam memberikan pelayanan adalah kadang ilegal dan tidak berkesinambungan.

#### **PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPs) DI SEKTOR AIR BERSIH**

Contoh *service contract* pada pelayanan air bersih adalah pelayanan air bersih di Indianapolis. Pelayanan air bersih diserahkan kepada pihak swasta, yaitu White River Environmental Partners (WREP). WREP merupakan lembaga swasta yang dipilih untuk mengoperasikan, memelihara dan mengelola sumber air yang berkapasitas 300.000.000 galon untuk melayani 850.000-900.000 penduduk Indianapolis. Fasilitas yang dikelola adalah pemeliharaan air, yang terdiri pengambilan air, penyaringan air dan pembersihan dengan menggunakan ozon. Fasilitas lain yang dikelola adalah pelayanan distribusi air, pembacaan meteran, operasi pengumpulan dan penagihan, serta pemeliharaan pipa-pipa bawah tanah. Hasil dari kerjasama ini adalah penghematan sebesar 60 juta dollar, dari kurun waktu 1993-1997, jika dibandingkan dengan anggaran yang biasanya diusulkan pemerintah. Selain itu, implikasinya adalah mutu air meningkat. Hal ini berdasarkan penelitian dari Indiana Water Pollution Control Association.

Kerjasama antara pemerintah kota Izmit Turki dengan Thames Water of Britain (TWB) merupakan bentuk kerjasama BOT. TWB diberikan kontrak senilai 933 juta dollar selama 15 tahun. Kontrak ini dimulai tahun 1995 dan untuk melayani 1,2 juta penduduk Izmit. Kontrak ini menjadi momen yang penting karena adanya inovasi dalam pembiayaannya. Hal ini disebabkan TWB bersedia untuk membagi kepemilikan dengan kontraktor lokal sebesar 70%. Selain itu, terdapat lembaga dana dari Jepang dan Perancis untuk memberikan pinjaman senilai 180 juta dollar dengan kompensasi kepemilikan sebesar 15 %. Kerjasama ini diwujudkan dengan pembangunan stasiun untuk pengambilan air dan pendistribusiannya. (Segal, 2003)

Menurut penelitian Bennet et al (1999), *concessions* antara pemerintah Buenos Aires Argentina dengan Aquas Argentinas (AA), merupakan bentuk PPPs di sektor air bersih. AA merupakan perusahaan konsorsium yang dipimpin perusahaan Lyonnaise des Aux dari Perancis. AA akan beroperasi di pengadaan air bersih di kota Buenos Aires selama 30 tahun dengan nilai investasi 4 milyar dollar. Sejak

beroperasi, AA melayani 1.000.000 juta penduduk untuk air minum. Pelayanan distribusi air dan kualitas air mengalami peningkatan. Peningkatan efisiensi ini disebabkan penurunan penggunaan zat kimia. Implikasinya adalah kesehatan air meningkat dan penurunan biaya pelayanan. Selanjutnya, tarif pelayanan air turun sebesar 30% dari tarif semula.

Menurut penelitian Nickson (2001), pemerintah Cartagena Spanyol melikuidasi perusahaan pelayanan air milik pemerintah. Hal ini disebabkan ketidakefisienan dan pelayanan yang buruk dalam pelayanan air bersih. Selanjutnya, pemerintah Cartagena membuat kerjasama dengan sektor swasta berwujud *joint venture* yang bernama Aquacar, untuk menggati perusahaan terdahulu. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan Aquas de Barcelona Spanyol, untuk melayani 750.000 penduduk kota Cartagena. Selanjutnya, Aquacar akan memperoleh persentase tetap dari total pendapatan dan bagian dari keuntungan. Hasilnya adalah Aquacar lebih responsif terhadap keinginan masyarakat dan kualitas air meningkat.

Menurut penelitian Bourbigot (2001), penyediaan air bersih di kota La Sirena merupakan contoh dari CBO. Kota La Sirena merupakan kota kecil dan 53% penduduknya bekerja di sektor non formal. Hal ini mengakibatkan pemerintah lokal kesulitan dalam memberikan pelayanan air bersih. Selanjutnya, masyarakat di sebelah tenggara kota La Sirena, membuat perusahaan kecil untuk memberikan pelayanan air bersih pada tahun 1996. Perusahaan ini didukung oleh lembaga keagamaan setempat. CBO berupa penyuplaian air bersih, pemompaan air, pipanisasi air. Selain itu, tarif dibedakan menjadi 2 yaitu tarif untuk orang mampu dan orang tidak mampu. Selain itu, kualitas air selalu dipertahankan dengan membentuk sebuah komite untuk pengawasan kualitas air.

## KESIMPULAN

Pada awalnya, *Public Private Partnership* mungkin tidak terlihat seperti solusi yang disukai. Hal ini disebabkan pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta. Padahal ada kecenderungan suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Melalui *Public Private Partnership*, keunggulan dari pihak swasta yaitu dinamisme, akses ke modal, pengetahuan teknologi, efisiensi manajerial, dan jiwa kewirausahaan akan terkombinasikan dengan tanggung jawab sosial, kewaspadaan lingkungan, pengetahuan lokal, dan perhatian pada kerja dari sektor publik. Di kota-kota seluruh dunia, pemerintah telah menemukan bahwa keterlibatan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur mereka melalui penurunan biaya dan perluasan cakupannya, dengan demikian dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE  
Bennet, Elizabeth. 2000. *Joint Ventures Public Private Partnership for Urban Environmental Services. PPPUE Series*. 1- 40

- Bennet, Elizabeth., P. Grohman., dan B. Gentry. 1999. Public Private Partnership for Urban Environmen. *PPPUE Series*. 1- 24
- Bourbigot, Marie M., dan Yves Picaud. 2001. Public Private Partnership for Municipal Water Services. Reform of the Water Supply and Sanitation Sector. Vol II. 126 – 131.
- Caplan, Ken. et al. 2001. Flexibility By Design: Lesson from Multi Sectors Partnership in Water and Sanitation Project. BPD Water and Sanitation Clusters. (June). 1-36.
- Nickson, Andrew. 2001. Establishing and Implementing a Joint Venture: Water and Sanitation Services in Cartagena Colombia. *Building Municipal Capacity Series*. (Januari): 1-37
- Plummer, Janelle. 2000. Favourable Policy and Forgotten Contract: Private Sector Participation in Water and Sanitation Services in Statterheim South Africa. *Building Municipal Capacity Series*. (November): 1-51
- Plummer, Janelle., G. Nhemachena. 2001. Preparing a Concession Working Toward Private Sector Participation in Water and Sanitation Services in Gweru Zimbabwe. *Building Municipal Capacity Series*. (Januari): 1-54
- Plummer, Janelle., R. Slater. 2001. Just Managing The Solid Waste Management Partnership in Biranatar Nepal. *Building Municipal Capacity Series*. (Januari): 1-49
- Ross, Robert. 2002. PAWC Purchase of The City of Coatesville Authority's Water and Wastewater Assets. *NCCP Project*. 1-5.
- Segal, Geoffrey F. 2003. The Atlanta Water Privatization: What Can We Learn. *Georgia Public Policy Foundation*. 1- 12.
- Thelen, Mike. 2002. South Zone Water Utility System. *NCCP Project*. 1-3
- Thomas, Ann., V. Curtis. 2001. *Public Private Partnership for Health: A Review of Best Practices*. (Dec): 1-21.
- Wahl, Richard W. 1993. Water Marketing in California: Past Experience Future Prospects. *Policy Study*. (July). 1-7.